

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan penilaian keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan, tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, pemerintah membuat dan mendukung program-program dengan konsep ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat, dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat. Konsep ini mengadakan perubahan penting ke arah kemajuan, khususnya ke arah pendobrakan halangan yang membelenggu sebagian besar rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan. Salah satu bukti kongkret tersebut ialah keberadaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang hingga abad ke-21 ini masih menjamin keberlangsungan perekonomian rakyat.

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) telah menjadi bagian penting dari sistem tata kelola perekonomian secara global. Eksistensi UMKM memainkan peran vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, nyatanya tidak hanya menyentuh negara berkembang saja tetapi sangat berpengaruh hingga ke negara maju. Diakui secara luas, bahwa UMKM sangat penting karena karakteristik utama mereka yang secara fundamental memiliki perbedaan signifikan dengan usaha besar. Terutama UMKM di spesifikasi sebagai usaha padat karya, terdapat di semua lokasi, lebih tergantung pada bahan-bahan baku lokal, hingga sebagai penyedia utama barang-barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah. Keberhasilan (UMKM) di dalam

menopang perekonomian pada saat krisis multi dimensi di Indonesia juga telah terbukti di dalam sejarah.

Secara historis, (UMKM) memberikan kontribusi kongkret di dalam mereduksi permasalahan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Sejak krisis tersebut melanda negeri ini, UMKM bahkan menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB, menjamin stabilitas pasar, dan penyerapan tenaga kerja. Kecenderungan kemampuan UMKM tersebut, mendorong Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menetapkan tahun 2004 sebagai tahun *International Microfinance*. Hal ini dimaksudkan tidak saja untuk menunjukkan keberpihakan badan dunia terhadap UMKM namun juga dalam kerangka mendorong negara berkembang seperti Indonesia, untuk lebih memperhatikan UMKM dengan cara memberikan berbagai stimulan dan fasilitas. (Sulistyastuti, 2014:29).

Melihat urgensinya, UMKM sangat layak mendapatkan titik perhatian serta intervensi yang strategis khususnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini terjadi, tentu atas dasar peran UMKM yang cukup kompleks diantaranya: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan inovasi, serta (5) mampu menekan angka kemiskinan. (Erwan Agus Purwanto:2017). Melihat kompleksitas peranan UMKM tersebut sudah seyogyanya membuat Pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk menjaga

keberfungsian, keberlangsungan, hingga perkembangan UMKM kedepannya (Sarbini Sumawinata:2016)

Secara holistik, perkembangan UMKM dewasa ini mengalami kemunduran dan menjadi sebuah tatanan masif yang tidak terhindarkan. Fakta yang paling mendasar ialah UMKM belum mampu menghantarkan kesejahteraan pelakunya dengan baik. Dalam arti keberadaan UMKM hanya sebatas sebagai *survival strategy* kaum marginal tanpa memberi peluang kepada mereka untuk melakukan mobilitas vertikal. Kondisi ini terjadi karena UMKM di Indonesia masih diposisikan sebagai sektor yang marginal. Termarginalisasinya sektor UMKM ini berkaitan dengan banyak faktor dari mulai minimnya akses perijinan, miskin kemampuan manajemen, serta kesulitan menyentuh akses pasar secara luas. Hal ini tentu di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Idris Yanto Niode (2009) dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis yang mengungkap beberapa fakta empiris seperti: masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM membuat kemampuan UMKM berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal. Hal ini dapat dilihat meski banyak yang terlibat dalam pengembangan UMKM, namun tugas pengembangan UMKM yang dilimpahkan kepada instansi-instansi tersebut diwarnai isu negatif misalnya politisasi terhadap KUKM, serta pemberian dana subsidi JPS yang tidak jelas dan tidak terarah. Demikian juga BUMN untuk menyisihkan labanya 1-5% juga tidak dikelola dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu, kredit perbankan jugasulit untuk diakses oleh UMKM, diantaranya adalah karena sistem birokrasi yang rumit serta banyaknya UMKM yang belum *bankable*.

Usaha pemerintah di dalam mengentas permasalahan diatas, masih sebatas pengembangan sumber daya manusia (pelaku UMKM) hingga memperluas jaringan *steakholder*. Kondisi ini tentu di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ana Syukriah yang termuat di Jurnal Economics Developement Analysis Journal. Hasil penelitian tersebut mengungkap hasil pelatihan pengembangan pelaku UMKM dan peningkatan inovasi produk masih berada di level rendah dan belum menyentuh seluruh pelaku UMKM. Usaha tersebut dinilai masih belum komperhensif dan nyatanya tidak menunjukkan output yang maksimal. Sisi lain yang menunjukkan bahwa UMKM sedang dalam masalah besar khususnya di Provinsi Sumatera Utara diperjelas oleh Plt Kadis Koperasi dan UMKM untuk wilayah Sumatera Utara sepanjang tahun 2017 ada sebanyak 2.404 gerai atau *home industry* tergolong UMKM yang harus mengambil keputusan akhir menutup usaha mereka. Kondisi ini pada dasarnya mencerminkan bahwa sesungguhnya UMKM sedang menghadapi situasi *double squeeze*, yang artinya mendapat tekanan yang datang dari sisi internal berupa ketertinggalan produktivitas, efisiensi inovasi, kendala operasional dan lokasi pemasaran serta tekanan dari sisi eksternal akibat membanjirnya produk asing di Indonesia. (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: 2018)

Berbagai macam kompleksitas permasalahan yang ada, perkembangan UMKM sejatinya masih terus membutuhkan perhatian dari pihak-pihak terkait demi menjaga keberlangsungannya. Salah satunya ialah Tebing Tinggi dimana kota yang mendapat julukan kota jasa dan perdagangan ini terkenal dengan pengolahan hasil pertanian yang didominasi oleh industri rumah tangga seperti kue kacang, pengolahan susu kedelai, tahu, gulamerah industri rumah tangga

keripik, kerupuk, lemang dan lain-lain. untuk wilayah Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi salah satu lahan segar pusat pertumbuhan UMKM.

Dari berbagai jenis UMKM yang hadir di kota tersebut, lemang salah satu produk UMKM andalan yang sudah ada sejak tahun 1950-an. Secara filosofi, untuk pertama kalinya lemang diperkenalkan oleh H. Abu Bakar Sikumbang dan Istrinya Hj. Siti Maimunah Sinaga yang saat ini sudah wafat, mereka menjadi pioner usaha lemang di daerah penelitian. Hingga dewasa ini lemang menjadi primadona andalan khususnya untuk oleh-oleh khas kota Tebing Tinggi.

Berdiri sebagai UMKM selama 70 tahun, dinamika perkembangan lemang di kota tersebut bukan tanpa hambatan dan tantangan yang berarti. Mulai dari masalah permodalan, manajemen pengelolaan, hingga permasalahan lokasi pemasaran produk. Sampai saat ini gerai tempat *display* lemang pun masih jauh dari kesan estetika yang menarik, kerap terjadi penertiban oleh pihak satpol PP, permasalahan pedagang yang menaikkan harga jual lemang di batas wajar, hingga permasalahan pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera.

(Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi: 2020)., mendeskripsikan terdapat penurunan jumlah gerai UMKM lemang yang ada di kota Tebing Tinggi dari tahun ke tahun. Namun, dari 5 tahun terakhir persentase penurunan jumlah gerai paling tinggi terjadi pada tahun 2017 menuju 2018. Kondisi tersebut bertepatan saja tol Trans Sumatera resmi beroperasi, dan UMKM lemang dinilai merasakan dampak yang cukup signifikan dan pada akhirnya terdapat 14 gerai yang gulung tikar. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera memiliki efek domino yang cukup besar dan menjadi permasalahan baru yang hadir di tengah kondisi sulit UMKM lemang

untuk terus bertahan. Fakta lain, dapat dilihat dari gerai tempat pedagang menjual lemang berpindah, Alasan mereka berpindah tempat karena menganggap kawasan pinggir jalan lintas Sumatera area perkebunan kelapa sawit dekat desa Cinta Damai Kecamatan Sei Bamban sudah tidak lagi Menguntungkan Pasca dioperasikannya jalur tol Medan-Tebing Tinggi. Alhasil jarak antara satu gerai dengan gerai lainnya saat ini hanya ± 2 meter. Ini tentu menimbulkan persaingan yang cukup ketat antar gerai. Di samping itu, keberadaan jalan tol tersebut dinilai tidak menguntungkan para pelaku UMKM di kota Tebing Tinggi. Berdasarkan penjelasan Kadin Provinsi Sumatera Utara bahwa produk lokal seperti lemang tidak di jual di lokasi *rest area* ruas jalan tol tebing tinggi.

Jika dilakukan komparasi, seharusnya pemerintah bersama dengan pihak terkait melakukan kajian ulang untuk menjaga amanat konstitusi yang menginginkan UMKM harus terus ditingkatkan keberfungsianya demi mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Dimana UMKM merupakan sumber pendapat masyarakat setempat. Di samping itu, khususnya untuk UMKM lemang mereka juga harus belajar dari pengalaman pasar Bengkel Serdang Bedagai, dimana hingga 2018 jumlah gerai yang sudah gulung tikar ada sebanyak 40 gerai. Padahal sebelum adanya pembangunan jalan tol, pasar Bengkel Serdang Bedagai termasuk pusat oleh-oleh terbesar di Sumatera Utara dan tergolong UMKM yang sukses dipasaran.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin memberikan analisis dan dampak dari permasalahan yang ada, dari sebuah fenomena dibukanya jalan tol Medan-Tebing Tinggi terhadap perkembangan dan keberlangsungan UMKM. Urgensi

penelitian ini dilakukan agar ada solusi dan masukan dari pemerintah dan pihak terkait dalam pengelolaan UMKM Lemang yang ada di Tebing Tinggi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Secara holistik, perkembangan UMKM dewasa ini mengalami kemunduran dan menjadi sebuah tatanan masif yang tidak terhindarkan.
2. Keberadaan UMKM hanya sebatas *survival strategy* kaum marjinal tanpa memberi peluang kepada mereka untuk melakukan mobilitas vertikal.
3. Usaha pemerintah di dalam membuat strategi perencanaan UMKM belum tepat menyentuh pelaku UMKM secara komperhensif
4. UMKM di Indonesia sedang menghadapi situasi *double squeeze*.
5. Kompleksitas permasalahan UMKM lemang di kota Tebing Tinggi akibat pembangunan jalan tol Trans Sumatera cukup banyak.
6. Gerai tempat pedagang menjual lemang berpindah pasca pembangunan jalan tol sehingga jarak antar pedagang sangat berdekatan.
7. Produk lokal seperti lemang tidak di jual di lokasi *rest area* ruas jalan tol Tebing Tinggi.
8. Perhatian pemerintah beserta pihak terkait terhadap keberlangsungan UMKM lemang belum maskimal, terlebih pasca beroprasinya jalan tol Trans Sumatera.

1.3 Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian perlu dibatasi masalah yang akan diteliti agar suatu masalah yang diteliti lebih jelas dan terarah. Maka pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lemang Pasca Beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatera di Kota Tebing Tinggi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan Masalah yang telah dipaparkan Maka yang Menjadi Rumusan Masalah Dalam Penelitian ini “Bagaimanakah Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lemang Pasca Beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatera di Kota Tebing Tinggi”.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah Yang telah dipaparkan maka yang menjadi Tujuan Penelitian dalam Penelitian ini “Untuk Mengetahui Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lemang Pasca Beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatera di Kota Tebing Tinggi”.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan masukan referensi bagi pembaca dalam mengembangkan pengetahuan dalam bidang Ekonomi Masyarakat yang berkaitan dengan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Sebagai wawasan dalam menambah pengetahuan di khalayak umum tentang kegiatan usaha Lemang.
3. Diharapkan dapat memberi sumbangan untuk pengembangan teori-teori menyangkut tentang Studi Analisis Perkembangan UMKM

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan bagi Pedagang UMKM Lemang di Tebing Tinggi.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah setempat dalam mendukung Kegiatan UMKM Lemang dan dapat memberikan penyuluhan mengenai Pengembangan Usaha Lemang sehingga dapat Memberikan Pemasukan Untuk Negara.